

**KONFLIK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA  
TAWA KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN**



**TESIS**

**AMBO TUWO S. RIVAI**

**E032212006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**KONFLIK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA  
TAWA KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi**

**Sosiologi**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**AMBO TUWO S. RIVAI**

**E032212006**

Kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**KONFLIK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAWA  
KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN HALMAHERA  
SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

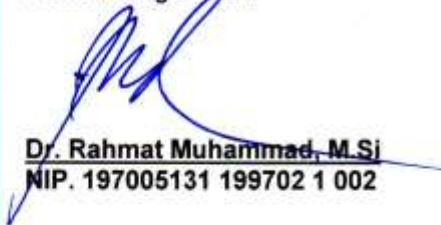
**AMBO TUWO S. RIVAI**

E032212006

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **08 Maret 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
NIP. 197005131 199702 1 002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si**  
NIP. 19651016 199002 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,



**Dr. Sakaria To Anwar, M.Si**  
NIP. 19690130 200604 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Ahil Sukri, S.IP, M.Si**  
NIP. 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Ambo Tuwo S. Rivai

Nim : E032212006

Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Maret 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMBEL'. A serial number 'BC CADAJX005198751' is visible at the bottom of the stamp.

Ambo Tuwo S. Rivai

## ABSTRAK

AMBO TUWO S. RIVAI. *Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Muh. Iqbal Latief).

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk konflik sosial pemilihan kepala desa di Desa Tawa dan implikasinya di masyarakat dan (2) bentuk integrasi sosial pascapemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi pada pemilihan kepala desa dapat dilihat dari prapemilihan dan pascapemilihan kepala desa. Pada prapemilihan, bentuk konfliknya bersifat laten yang dipicu oleh pertikaian antara tim sukses petahana dengan gabungan beberapa marga. Hal ini terjadi karena masyarakat kecewa terhadap sikap dan tindakan petahana yang tidak menyalurkan bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan. Begitu juga, gaji kepala urusan (KAUR), badan permusyawaratan desa (BPD) tidak dibayarkan dan juga pembangunan infrastruktur desa baik, jalan setapak maupun pagar tidak selesai. Indikasi konflik laten berbentuk protes warga. Adapun pada pascapemilihan, bentuk konfliknya bersifat manifest, yakni konflik yang diwarnai dengan pemukulan dan pertikaian antarkontestan yang berimplikasi rusaknya tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik sosial justru mengonsolidasikan berbagai marga di Desa Tawa sehingga integrasi sosial tetap terjaga. Hal ini berbeda sebelum pemilihan, beberapa marga di desa justru renggang. Namun, setelah pemilihan hubungan mereka makin baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembenahan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala desa agar pelaksanaan demokrasi di desa tidak merusak tatanan sosial desa. Oleh karena itu, disarankan adanya revisi undang-undang tentang Pemerintahan Desa.

Kata kunci: konflik sosial, pemilihan, kepala desa, Halmahera Selatan



## ABSTRACT

AMBO TUWO S. RIVALI. *Social Conflict of Village Head Election in Tawa Village, Bacan Timur Tengah District, South Halmahera Regency* (supervised by Rahmat Muhammad and Muh. Iqbal Latief)

This study aims to analyze (1) the form of social conflict in the village head election in Tawa Village and its implications in the community, and (2) the form of social integration after the village head election. This research used a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were performed using in-depth interviews, observation, and documentation. Determination of informants used purposive sampling technique, and data consisted of primary and secondary data. Data analysis techniques used were qualitative analysis, i.e. data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the forms of social conflict happening in the village head election are seen from pre and post village head elections. In the past, the form of conflict is latent, triggered by a dispute between the incumbent's success team and a combination of several clans. This happens because the community is disappointed with the attitude and actions of the incumbent who do not distribute direct cash assistance in accordance with the rules. Likewise, the salaries of the head of affairs (KAUR), the village consultative body (BPD) are not paid and the construction of village infrastructure, both paths and fences are not completed. Indications of latent conflict take the form of citizen protests. Meanwhile, in the post-election period, the form of conflict is manifest, i.e. the conflicts that are coloured by beatings and disputes between contestants, which have implication on the destruction of the social order of the community. However, social conflict actually consolidates various clans in Tawa Village, so social integration is maintained. This is different the one before the election, in which some clans in the village are actually tenuous but after the election the relationship is getting better. Based on the findings of this research, the recommendation is that it is important to fix the laws governing village head elections so that the implementation of democracy in the village does not damage the village's social order. Therefore, a revision of the law on village government is recommended.

Keywords: social conflict, election, village head, South Halmahera



## PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memancarkan sumber-sumber hikmah dari hati orang yang jujur hingga hikmah itu mengalir, membuka pendengaran para pecinta (al-muhibbin) dan orang yang berhasrat menerimanya hingga pendengaran mereka menjadi sangat tajam; menyinari penglihatan orang yang senantiasa menghadapi wajahnya dan serius menuntutnya hingga penglihatan mereka menjadi sangat jeli.

Shalawat kusampaikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, Nabinya yang mulia dan hamba-Nya. Kusampaikan pula pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang berada dalam naungan cintanya.

Proses belajar didunia kampus hingga terselesainya Tesis ini adalah berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu ibunda Almarhumah Afiah Basir dan ayahanda Slamet Rivai yang senantiasa mendampingi dan memberikan arti sebuah nilai dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi. Untuk saudara tercinta Rosmina, S.Pd., Adema Slamet, S.Pd., Asriah Rivai, S.Sos., Gunawan Slamet, Kak Din, Nasrul dan Ainun terima kasih atas dukungan dan doa kepada peneliti. Kedua orang tua peneliti (Mertua) ibunda Salma dan ayahanda Syafruddin terimakasih atas dukungan dan doanya untuk peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
2. Terimakasih kepada istri tercinta Yulli Yanna, S.Pd atas persetujuan, dukungan, doa untuk penelittii melanjutkan S2. Maaf atas berserakannya kertas-kertas revisi tesis, buku-buku selama proses penyelesaian studi ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. SC, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Terima kasih kepada Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada Dr. Sakaria To Anwar, M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi.
7. Terima kasih kepada Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. selaku pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
8. Terima kasih kepada Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si. selaku pembimbing II atas segala bimbingan serta arahan-arahan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.
9. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku penguji I, Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku penguji II dan Dr. Buchari Mengge, S.sos, MA selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam penyusunan tesis ini.
10. Terima kasih kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fisip Unhas yang selalu membantu dalam hal pengurusan berkas Penyelesaian Studi S2.
11. Seluruh Dosen di Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmunya beserta pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
12. Terima kasih kepada Pengurus Formasi, Ahmad Muhajir Periode (2022), Dienul Fajry Periode (2022-2023), Bitu Periode (2023), Muh. Adiyat Makkuaseng (2023-2024) selaku ketua Formasi dan seluruh jajaran pengurus Formasi.
13. Terima kasih kepada Keluarga Besar saya yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil sehingga saya dapat bersemangat



dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi saya di S2.

14. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik dalam proses pembuatan persuratan izin penelitian.
15. Terima kasih kepada Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat Tawa yang telah memberikan pelayanan dengan baik, serta memberikan sedikit banyak informasi dan pengalaman yang menyangkut dalam hal penyusunan penelitian ini.
16. Terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Pilkades di Desa Tawa yang telah memberikan informasi dan pengalamannya sehubungan masukan data dalam penyelesaian tesis ini.
17. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan jawaban hingga selesainya penelitian ini.
18. Terima kasih kepada keluarga Besar DDI Abdurrahman Ambo Dalle Makassar.
19. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Seangkatan Sosiologi (S2) 2021 II: Jupri, Nisa, Ida, Fiqa, Nuri, Misriani, Rahmat K, Jul Untung Papalia, Ariwal, Nurcholis Majid Datu, Diman, Marta, dan Wanda yang selalu memberikan support dan pengalaman selama proses penyelesaian studi S2.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf dan membuka diri untuk setiap kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Sosiologi.

Makassar, 08 Maret 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR .....	8
2.1 Kajian tentang Dinamika Konflik Sosial Pilkades .....	8
2.3 Teori yang Digunakan .....	17
2.3.1 Teori Konflik (Coser).....	17

2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.5 Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	28
3.2 Jenis Penelitian .....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Informan Penelitian .....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5.1 Wawancara .....	32
3.5.2 Observasi.....	34
3.5.3 Dokumentasi .....	34
3.6 Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa Tawa.....	37
4.1.2 Letak Geografis Desa Tawa .....	38
4.1.3 Gambaran Demografis Desa Tawa .....	39
4.1.4 Gambaran Administratif Desa Tawa.....	40
4.1.5 Gambaran Sosial dan Ekonomi Desa Tawa .....	40
4.1.6 Sejarah Pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa .....	40
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>

5.1 Bentuk Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa dan Implikasinya di masyarakat.....	44
5.1.1 Konflik antara BPD dan Petahana .....	44
5.1.2 Konflik antar Marga.....	49
5.1.3 Konflik antar Pendukung.....	56
5.1.4 Konflik antar Pendukung Petahana dan Majelis Jemaat GPM.....	60
5.1.5 Katup Pengaman atau Savety Valve .....	65
5.2 Implikasi Sosiologis Konflik Sosial Pilkades Desa Tawa .....	72
5.2.1 Fenomena Disintegrasi kemargaan .....	72
5.2.2 Fenomena Disintegrasi sosial keagamaan .....	79
5.3 Bentuk Integrasi Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa .....	88
5.3.1 PSU dan Dinamika Sebelum Integrasi.....	88
5.3.2 Integrasi Marga Loleo .....	92
5.3.2 Integrasi Marga di Sektor Kalfari, Eden dengan Getsamani.	97
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
6.1 Kesimpulan.....	101
6.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

1. GAMBAR 2.5 KERANGKA PIKIR.....	63
2. GAMBAR 4.1 PETA DESA TAWA.....	38
3. GAMBAR 5.1 KONDISI FISIK JALAN.....	46
4. GAMBAR 5.2 KONDISI FISIK PAGAR.....	47
5. TABEL 3.1 TABEL INFORMAN.....	67
6. TABEL 4.1 DEMOGRAFIS DESA TAWA.....	39
7. TABEL 5.1 NAMA-NAMA BLT DESA TAWA.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 01. Pertama Pedoman Wawancara.....	107
2. Lampiran 02. Surat Penelitian.....	110
3. Lampiran 03. Dokumentasi Wawancara.....	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Runtuhnya masa Orde Baru dan hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi di panggung politik pemerintahan baik tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial (Razak & Harakan, 2017) dalam (Ahmad Taufik, 2018: 15).

Pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya, karena adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa panas dibandingkan pemilihan yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi hal mutlak. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih (Mukhaelani, 2013).

Dalam praktiknya, pilkades ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tahun 1948. Namun dengan adanya momentum reformasi maka regulasi yang berkaitan dengan pilkades telah berubah dan sekarang ini digunakan undang-undang no. 6 tahun 2014 sebagai payung hukum pilkades. Namun demikian, hal ini juga masih dipersoalkan karena akses yang ditimbulkannya, tidak hanya menjadi bagian positif dari demokrasi yang menciptakan kondisi berubahnya tatanan sosial masyarakat, namun pilkades juga memiliki efek negatif dengan munculnya konflik-konflik yang berkepanjangan.

Pilkades setelah adanya Undang-undang no. 6 tahun 2014 itu ternyata orientasinya tidak hanya menjadikan seseorang mendapatkan status sebagai kepala desa tetapi ada perebutan sumber daya yang lain yakni anggaran dana desa. Karena adanya perebutan itu maka dalam banyak kasus setiap pilkades itu selalu diwarnai dengan adanya konflik baik yang sifatnya *latent* atau *manifest*, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh La, et al (2017) tentang konflik sosial antar masyarakat pasca pemilihan kepala desa (studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan) menemukan bahwa konflik sosial antar masyarakat pasca pemilihan kepala desa di desa Mano terjadi disebabkan karena disharmonisasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat, keberpihakan panitia pemilihan terhadap salah satu pasangan calon kepala desa, penggunaan izasah palsu, adanya 2 (dua) SK Pjs Kepala Desa Mano yang dikeluarkan



Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Konflik sosial terjadi cukup lama dan resolusi konflik berupa mediasi sudah pernah dilakukan antara pihak kecamatan, Kapolres, Tokoh Agama dan Masyarakat, namun hasilnya belum menemukan titik terang dan kesepakatan untuk berdamai di antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga konflikpun muncul kembali. Hasil penelitian Ali Lating tersebut memperlihatkan konflik masih terus berlangsung.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Wance (2019) tentang Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menemukan bahwa pertama, Dominasi kekuasaan penyelenggara di Desa Babang yaitu keperpihakan penyelenggara pilkades serta masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan salah satu pasangan. Yang kedua, penyebab konflik karena terjadinya mobilisasi penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu konflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016.

Namun demikian, penelitian La, et al (2017) dan Wance (2019) masih terbatas pada persoalan konflik yang menimbulkan disintegrasi. Padahal dalam perspektif sosiologi konflik tidak hanya menimbulkan efek negatif tetapi juga bisa memperkuat integrasi sosial. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ernas (2018), Retnowati (2018) bahwa walaupun orang-orang tersegregasi karena konflik namun lambat laun integrasi sosial mulai terjadi.

Dalam konteks itu maka fenomena ini juga menarik untuk diteliti pada pilkades di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, dikarenakan terjadi pemukulan kepada salah satu calon kepala Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan pasca perhitungan suara.

Sebagaimana diungkapkan oleh haliyora.id (2022) bahwa kejadian pemukulan itu sekitar pukul 16.00 WIT. Sesaat setelah perhitungan suara pilkades selesai yang dimenangkan oleh korban (Lonli Loleo) dengan selisih hanya 1 suara. Jadi pelaku cakades incumbent Michael Hoga kalah, makanya mungkin sedikit emosi karena hasil perhitungan suara korban Lonli Loleo yang menang, “ungkap Yance Loleo, kerabat dari korban (Haliyora.id, 20/11/2022).

Hal demikian juga diungkapkan oleh TelusurMalut.com (2022) bahwa saat selesai perhitungan surat suara, Cakades Incumbent kalah langsung maju menginjak kotak surat suara, disitu langsung terjadi kekacauan, saya (Cakades Terpilih) langsung mengambil posisi mau mengamankan diri keluar dari TPS, tetapi saya langsung dipukul dikepala bagian belakang oleh pendukung incumbent, saya juga melihat cakades incumbent langsung menarik kursi di TPS dengan tujuan mau memukul pendukung saya (TelusurMalut.com, 19/11/2022).

Adapun hasil akhir perhitungan suara menurut data yang diterima haliyora.id (2022) bahwa untuk Pilkades Desa Tawa, Hengki Ngowaro, cakades nomor urut 01, dengan perolehan 35 suara. Cakades nomor urut

02, atas nama Michael Hoga (Incumbent), dengan perolehan 173 suara. Cakades nomor urut 03, Trisno Nicolaas, dengan 164 suara. Kemudian cakades nomor urut 04 atas nama Alfonsius Habari, dengan perolehan 124 suara. Selanjutnya, cakades nomor urut 05 atas nama Lonli Loleo yang mendapatkan 174 suara.

Hasil kekerasan ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yakni menggelar deklarasi damai dan pakta integritas untuk menjaga marwah demokrasi pada hari sabtu tanggal 22 oktober tahun 2022 sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan.

Menurut laporan dari Tribun Ternate (2022) deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah pelaksanaan Pilkades Damai, yang dibacakan langsung perwakilan calon kepala desa (Cakades) dan diikuti ratusan Cakades lainnya. Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh Cakades, agar menjaga marwah demokrasi selama berlangsungnya Pilkades. Maka perlu dihilangkan konflik antarpending Cakades, melalui deklarasi Pilkades damai dan penandatanganan pakta integritas secara bersama. Deklarasi damai yang dilakukan pemerintah daerah juga merupakan tanggapan terhadap konflik-konflik pemilihan kepala Desa yang sudah terjadi sebelumnya.

Karena itu, penelitian ini didasarkan pada upaya untuk mengetahui konflik yang terjadi di pilkades itu mengarah kepada

rusaknya tatanan sosial di masyarakat desa akibat adanya fragmentasi di masing-masing kelompok atau justru konflik ini memperkuat integrasi sosial.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema penelitian “**Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana bentuk konflik sosial pemilihan kepala desa di Desa Tawa dan implikasinya di masyarakat?
2. Bagaimana bentuk Integrasi sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Tawa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan konflik sosial pemilihan kepala desa di Desa Tawa dan implikasinya di masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan Integrasi sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Tawa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi peneliti, dapat bermanfaat dalam mengaktualkan potensi jiwa yakni indra, imajinasi, dan akal dalam menganalisa hal yang menjadi topik penelitian. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan ilmu tentang konflik sosial pemilihan Kepala Desa di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan konsep yang sudah ada dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu Sosiologi khususnya terkait konflik sosial.
3. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal pengambilan kebijakan terkait penanganan pemilihan kepala desa kedepan yang lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1 Tinjauan tentang Dinamika Konflik Pilkadaes di Indonesia**

Penelitian ini memfokuskan pada dinamika pilkades yang terjadi khususnya di era reformasi. Dalam kaitan itu, maka relevan untuk menggambarkan atau melakukan tinjauan terhadap dinamika konflik pilkades di Indonesia. Untuk jelasnya digambarkan sebagai berikut:

Sejarah mencatat bahwa, perhatian manusia terhadap konflik tercermin dalam literatur keagamaan kuno. Perang antardewa di zaman kuno bukan hanya untuk melindungi “kebenaran nilai-nilai kehidupan sehari-hari, tetapi juga keharusan memerangi dewa-dewa lain seperti mereka sendiri, sebagaimana komunitas mereka juga berperang, dan dalam peperangan ini pun mereka harus membuktikan kemahakuasaan mereka. Mitologi Yunani mengenal Ares, dewa perang yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam. Saudara perempuannya Eris adalah dewi perpecahan yang gemar bertengkar dan berperang (Lauer, 1993).

Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa konflik telah menjadi perhatian manusia ribuan tahun lamanya yang kemudian tercatat dalam literatur keagamaan kuno. Sebagaimana para dewa-dewa yang berperang untuk kepentingan membuktikan kemahakuasaan mereka terhadap dewa-dewa yang lain, begitu juga dengan berbagai relasi antarmanusia, antarkelompok, dan antarnegara tidak pernah bersih dari muatan

kepentingan, penguasaan, permusuhan, dan penindasan. Inilah kodrat manusia dalam sejarah masyarakat manusia. Rasa cinta dan empati seperti lapisan tipis yang tidak mampu menjaga relasi harmonis secara permanen. Sehingga manusia membangun berbagai pengetahuan (nilai) dan aturan sosial (norma) untuk menjaga tubuh masyarakat yang disusun oleh rentannya relasi-relasi sosial tersebut. Namun demikian, nilai dan norma sosial memiliki sifat yang statis, pada tingkat kritis tidak mampu membuka peluang pemecahan masalah pada saat relasi sosial memanas oleh kepentingan dan perilaku bermusuhan yang terlepas dari prosedur norma dan etika nilai sosial. Kondisi inilah yang menciptakan krisis relasi sosial yang mana setiap subjek jatuh pada berbagai pilihan untuk menjatuhkan dan meniadakan subjek lain (Susan, 2009).

Dalam konteks keindonesiaan, adanya fakta *vulnerable society* (masyarakat rentan) Indonesia. Ada tiga ciri mendasar dari masyarakat rentan Indonesia; 1) tingginya tingkat segregasi sosial, 2) rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi, dan 3) terisolasi dalam pulau-pulau kecil. Masyarakat Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil yang penduduknya tersegregasi dalam kelompok etniskeagamaan. Misalnya, segregasi yang terlihat oleh tata wilayah desa-desa di Maluku yang terpisah-pisah secara tegas oleh identitas etnis keagamaan. Kasus konflik kekerasan pada tahun 1999-2003 di kepulauan Maluku seperti Tual, Seram, dan Ambon cukup kuat dipengaruhi oleh fakta segregasi sosial (Susan, 2009). Menurut Usman (2006) bahwa penyebab konflik Maluku Utara 1999-2001 salah satunya merupakan faktor geografis dan

demografis Maluku Utara yang terkait dengan kedua kelompok (Muslim dan Kristen) masih tinggal di wilayah-wilayah yang sangat terpisah satu sama lain menyebabkan sikap penduduk dari berbagai sudut tetap negatif, dan emosi tetap tinggi. Oleh karena itu, segregasi sosial dan terisolasinya masyarakat pada pulau-pulau kecil sebagai sebab rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi masyarakat.

Selain itu, masyarakat Indonesia yang sangat heterogen kecenderungannya untuk terjadinya benturan atau konflik sosial antar kelompok sulit untuk dihindari. Menurut Triyana & Sukriyanto (2022) ada banyak jenis konflik multikultural di Indonesia: konflik individu, konflik sosial, konflik ras, konflik agama, konflik keluarga, dan konflik budaya. Salah satu daerah di Indonesia yang juga rentan konflik agama adalah Sumatera Utara. sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wira & Kholil (2023) berpendapat bahwa Heterogenitas masyarakat Sumatera Utara dipandang rentan akan konflik sosial keagamaan.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial, termasuk yang terjadi secara tatap muka. Dalam teori sosiologi konflik, konflik tidak hanya berwajah negatif, tetapi konflik juga memiliki fungsi positif terhadap masyarakat. Dalam konteks itu, konflik pilkades di Indonesia juga mempunyai dinamika perubahan sosial ke arah yang positif dan juga negatif. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2019) tentang konflik sosial pada pemilihan kepala desa (studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan)



menemukan bahwa faktor-faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala desa, meliputi: (1) Sikap ambisius antar masyarakat pendukung calon; (2) Tidak mau menerima kekalahan; (3) Perbedaan kepentingan antara individu/kelompok. Adapun bentuk resolusi konflik sosial pada pemilihan kepala desa yaitu melalui proses mediasi dengan menghadirkan orang ketiga yang dijadikan sebagai penengah yang sifatnya tidak memihak salah satu kubu yang sedang berselisih, dilakukan pada saat ada acara-acara di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan seperti acara pernikahan, aqiqah, dan tahlilan yang bertujuan untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wance, 2019) tentang faktor penyebab konflik pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan ditemukan bahwa Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik Pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaan Pilkades tahap pertama mengalami konflik Pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selain itu, konflik Pilkades terjadi

karena aktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik Pilkades di Halmahera Selatan dilakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesaian konflik Pilkades.

Menurut Marx, bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilikan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Karena itu, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok: “yang memiliki” dan “yang tidak memiliki” kekuatan-kekuatan produksi – menjadi kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas tersebut, dapat mensub-ordinasikan kelas sosial lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang ter subordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, kelas-kelas yang ter subordinasi memberontak serta menuntut penghapusan hak-hak istimewa kelas dominan. Sementara menurut Weber, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi perlu juga dilihat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang sering terjadi. Diantara berbagai tipe konflik itu, terdapat dua tipe konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang fundamental (kehidupan sosial dalam kadar tertentu, dan dominasi). Pertentangan

untuk memperoleh kekuasaan semata-mata didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kadar tertentu, sebagai tujuan dari pertentangan itu sendiri (Sanderson, 2003: 11-14).

Dahrendorf sering dihubungkan dengan apa yang disebut aliran konflik, karena ada pertentangan terhadap pandangan sebelumnya, yang menggambarkan bahwa masyarakat itu dalam pengertian “koordinasi fungsional, integrasi dan konsensus”. Dalam sejarah sosiologi Barat, Dahrendorf menemukan hal-hal penting dalam pemikiran Marx. Ia lebih mempercayai pertimbangannya sendiri dengan menggunakan metode empirik dalam menerima dan menolak teori-teori Marx. Versi utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa konsep kelas ala Marx yang telah dirumuskan, ternyata dalam perkembangannya terputus penerapannya terutama pada situasi abad ke-20. Dahrendorf mencoba untuk meyakinkan bahwa analisis Marx terlalu sempit, hanya membahas tentang konsep pemilikan legal. Kriteria kelas ala Marx, yaitu alat produksi dalam pengertian yang legal dan bukan struktur otoritas. Jadi, dengan cara membebaskan definisi kelas yang sempit, dapat dipergunakan bagi seluruh hubungan produksi (Johnson, 1986).

Selain itu, penelitian lain yang juga memperlihatkan konflik sosial pemilihan kepala desa (Usman dan Marzaman, 2019) tentang Demokrasi Berujung Konflik-Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa Jembatan Merah, Kab. Gorontalo Utara, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya pedesaan seringkali disebabkan oleh persaingan, kesalahpahaman, keegoisan dan perbedaan

pendapat. Perbedaan dalam masyarakat harus di kelola secara baik dan benar sehingga tidak akan berubah menjadi konflik di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah memegang peran penting dalam proses pengelolaan konflik sosial. Pemerintah Kecamatan Tomilito dengan cepat telah menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat dengan cara melakukan musyawarah (mediasi) dengan pihak yang bertikai sehingga konflik terselesaikan dengan baik. Pemerintah juga melakukan proses rekonsiliasi konflik dengan melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk memperkuat kembali tali persaudaraan dan menciptakan perdamaian.

Tokoh lain, yang dijadikan acuan dalam membahas perspektif teori konflik adalah Lewis Coser. Fungsi konflik pertama kali ditelusuri oleh Luis A. Coser (1956) dalam bukunya, "The Functions of Social Conflict." Coser menunjukkan bagaimana fungsi konflik dalam sistem sosial. Ia juga menolak bahwa hanya konsensus dan kerja sama yang memiliki fungsi dalam integrasi sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya bersifat negatif. Konflik memiliki fungsi positif bagi masyarakat melalui perubahan sosial yang ditimbulkannya (Susan, 2009, h. 43).

Ernas (2018) melakukan penelitian tentang konflik ke integrasi sosial: pelajaran dari Ambon-Maluku menemukan bahwa Pasca konflik di Ambon-Maluku, menunjukkan bahwa meskipun orang-orang tersegregasi di wilayah Islam-Kristen, namun lambat laun integrasi sosial mulai terjadi. Proses integrasi yang terjadi juga memberikan nilai-nilai baru yang memberi harapan untuk masa depan perdamaian. Menggunakan teori adaptasi integrasi sosial dari paradigma klasik struktural-fungsional

Parsonian, studi ini berhasil dirumuskan beberapa temuan penting. Pertama, integrasi sosial yang terjadi di Ambon dapat berjalan alami melalui interaksi ekonomi, konsensus tentang keseimbangan politik dan semangat keagamaan yang inklusif. Kedua, integrasi sosial baru telah menciptakan makna penting yang mengarah pada model harmoni aktif yang dicirikan oleh proses sosial interaksi yang lebih aktif antar umat beragama. Ketiga, penelitian ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun telah terjadi proses integrasi sosial yang positif, masyarakat masih perlu mewaspadaai tumbuhnya ideologi agama radikal dan juga penguatan politik identitas dalam politik lokal yang berbahaya bagi pembangunan perdamaian.

Penelitian lain yang berkaitan dengan fungsi konflik dilakukan oleh (Retnowati, 2019) tentang agama, konflik dan integrasi sosial refleksi kehidupan beragama di Indonesia: belajar dari komunitas Situbondo membangun integrasi pasca konflik menemukan bahwa integrasi dalam masyarakat Situbondo dan upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh masyarakat dan umat beragama di Situbondo. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Situbondo menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo yang mengalami keretakan dapat dipulihkan kembali.

Selain itu, (Hasbullah, 2010) ketika meneliti tentang Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisis Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial) menemukan bahwa pengakuan terhadap

pluralisme agama dalam komunitas sosial menjanjikan mengedepankan prinsip inklusif - prinsip yang mengutamakan akomodasi dan non konflik - di antaranya. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama memiliki berbagai klaim kebenaran yang ingin dijunjung tinggi, sementara realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan beragama. Tradisi perbedaan pendapat di antara orang-orang, jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Dengan tradisi pemikiran yang berbeda, kita menjadi tidak mudah untuk merasa paling benar sendiri. Pada tradisi pemikiran berbeda yang berakhir dengan dialog, ada nuansa saling mengkritik kelemahan masing-masing guna memperbaikinya di kemudian hari. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mau menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip pluralisme agama dan latitudinarian. Persoalannya, pengakuan dan kebebasan berbhinneka merupakan potensi yang sangat baik untuk menyadarkan negeri ini dari kezaliman sekelompok orang dan korupsi yang merajalela. Prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi adalah sekat-sekat sekat, agama, dan paham keagamaan.

Selain fungsi konflik, coser juga berbicara tentang katup pengaman atau *safety valve*. Katup pengaman atau *safety valve* ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. “katup penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Halim & HM (2020) ketika meneliti tentang *seloko adat* sebagai *safety valve* untuk mencegah konflik agama di Kota Jambi, menemukan bahwa Seloko Adat

adalah bentuk kontekstualisasi lain dari konsep Katup Pengaman dari Coser yang terbukti mampu menghindarkan masyarakat dari konflik anarkis.

## **2.3 Teori yang Digunakan**

### **2.3.1 Teori Konflik (Coser)**

Dahrendrof mengakui pentingnya karya Lewis Coser, yang berfungsi pada fungsi konflik di dalam memelihara *status quo* (Ritzer, 2012: 455). Coser memperlihatkan bagaimana konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial. Ia juga menolak bahwa hanya konsensus dan kerja sama yang memiliki fungsi terhadap integrasi sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya (Susan, 2009: 43)

Menurut (Abidin, 2015) ada beberapa pemikiran Coser yakni:

#### **1. Katup Penyelamat**

Katup penyelamat atau *safety valve* ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. “katup penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu “membersihkan suasana” dalam kelompok yang sedang kacau.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di

antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah lembaga pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser; lewat katup penyelamat itu, permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu: mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan- ledakan destruktif.

## 2. Konflik Realistis dan Nonrealistis

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistis dan nonrealistis. Konflik Realistis, memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistis didorong oleh keinginan tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar-agama, antar-etnis, dan konflik antar-kepercayaan lainnya. Konflik adalah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak. Konflik nonrealistis merupakan satu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok, dan cara ini mewujudkan bentuk-bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari



sumber-sumber lain. Antara konflik yang pertama dan yang kedua, konflik yang nonrealistis lah cenderung yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, konsensus dan perdamaian tidak akan mudah diperoleh. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus, sehingga menghasilkan situasi konflik yang lebih kompleks (Coser, 1957) dalam (Susan, 2009: 44).

### 3. Permusuhan dalam Hubungan Sosial

Menurut Coser terdapat kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresif. Sebagai contoh adalah: Dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meniggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Contoh-contoh dimana konflik tidak diikuti oleh rasa permusuhan biasanya terdapat pada hubungan-hubungan yang bersifat parsial atau segmented, daripada hubungan yang melibatkan keseluruhan pribadi pada peserta.

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan

ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut. Contoh: Seperti konflik antara suami dan istri, serta konflik sepasang kekasih.

#### 4. Isu Fungsionalitas Konflik

Coser mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok-luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Coser berpendapat bahwa “tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi” merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah konflik dapat mempertinggi kohesi kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam kelompok mirip sekte itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok. Untuk kelangsungan hidupnya kelompok “mirip-sekte” dengan ikatan tangguh itu bisa tergantung pada musuh-musuh luar. Konflik dengan kelompok-kelompok lain bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik ini sering (sebagaimana yang telah kita lihat dengan berbagai hubungan emosional yang intim) berdasar atas isu yang non-realistis.

Coser mengutip berbagai contoh fenomena itu dari catatan-catatan historis mengenai kelahiran serta perkembangan serikat-serikat buruh. Akan tetapi contoh yang sama dapat ditemukan pada bangsa yang sedang berperang, pada kelahiran sekte keagamaan atau diantara kelompok-kelompok politik ekstrim di suatu Negara. Sementara kontroversi internal tidak dapat ditolerir, misalnya di antara kelompok-kelompok keagamaan mirip sekte seperti “The Children of God”, perjuangan kelompok tersebut melawan kaum kafir mungkin memperkuat kemampuannya untuk menarik serta mempertahankan orang-orang yang baru masuk agamanya. Bilamana perjuangan yang membawa kelompok demikian untuk memperhatikan media periklanan tiba-tiba terhenti, Coser

mengatakan musuh-musuh baru mungkin mencoba untuk lebih memperkuat perkembangan dan peningkatan kohesi kelompok-kelompok yang demikian tak hanya mencapai identitas struktural lewat oposisi dengan berbagai kelompok luar tetapi dalam perjuangannya juga mengalami peningkatan integrasi dan kohesi.

Bilamana contoh tentang “The Children of God” itu dilanjutkan maka kita dapat melihat penjelasan dari proposisi yang berhubungan dengan ideologi dan konflik. Para anggota sekte tersebut sering digambarkan sebagai kelompok fanatik. Singkatnya, bilamana terdapat konsensus dasar mengenai nilai-nilai inti yang ada dalam suatu kelompok maka konflik dengan berbagai out-groups dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok. Coser menyatakan bahwa kelompok-kelompok pejuang yang diorganisir secara kaku mencari musuh demi mempermudah kesatuan dan kohesi mereka. Dengan demikian jelas bahwa fungsionalisme tahun 1950-an, yang terfokus pada masalah integrasi, telah mengabaikan isu konflik di dalam masyarakat. Pendekatan ini cenderung melihat konflik bersifat merusak dan memecah belah. Coser menunjukkan bahwa konflik dapat merupakan sarana bagi keseimbangan kekuatan, dan lewat sarana demikian kelompok-kelompok kepentingan melangsungkan masyarakat.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Widayanti, et al (2019) melakukan penelitian tentang konflik sosial pada pemilihan kepala desa studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian, menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala desa, meliputi: (1) Sikap ambisius antar masyarakat pendukung calon; (2) Tidak mau menerima kekalahan; (3) Perbedaan kepentingan antara individu/kelompok. Adapun bentuk resolusi konflik sosial pada pemilihan kepala desa yaitu melalui proses mediasi dengan menghadirkan orang ketiga yang dijadikan sebagai penengah yang sifatnya tidak memihak salah satu kubu yang sedang berselisih, dilakukan pada saat ada acara-acara di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan seperti acara pernikahan, aqiqah, dan tahlilan yang bertujuan untuk memper-temukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian.

Wance (2019) dengan fokus penelitiannya tentang faktor penyebab konflik pemilihan kepala desa serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan menyimpulkan bahwa Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik Pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaan

Pilkades tahap pertama mengalami konflik Pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selain itu, konflik Pilkades terjadi karena aktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik Pilkades di Halmahera Selatan dilakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesaian konflik Pilkades.

Selanjutnya, Usman & Marzaman (2019) melakukan penelitian terkait dengan demokrasi berujung konflik-konflik sosial pasca pemilihan Kepala Desa Jembatan Merah, Kab. Gorontalo Utara. Sebagai simpulan, bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya pedesaan seringkali disebabkan oleh persaingan, kesalahpahaman, keegoisan dan perbedaan pendapat. Perbedaan dalam masyarakat harus dikelola secara baik dan benar sehingga tidak akan berubah menjadi konflik di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah memegang peran penting dalam proses pengelolaan konflik sosial. Pemerintah Kecamatan Tomilito dengan cepat telah menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat dengan cara melakukan musyawarah (mediasi) dengan pihak yang bertikai sehingga konflik terselesaikan dengan baik. Pemerintah juga melakukan proses rekonsiliasi konflik dengan melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk memperkuat kembali tali persaudaraan dan menciptakan perdamaian.

Wance & Djae (2019) meneliti tentang dominasi kuasa pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menemukan bahwa pertama, Dominasi kekuasaan penyelenggara di Desa Babang yaitu keperpihakan penyelenggara pilkades serta masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan salah satu pasangan. Yang kedua, penyebab konflik karena terjadinya mobilisasi penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu konflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016.

Selanjutnya, La, et al (2017) melakukan penelitian tentang Konflik sosial antar masyarakat pasca pemilihan kepala desa studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagai kesimpulan, bahwa konflik sosial antar masyarakat pasca pemilihan kepala desa di desa Mano terjadi disebabkan karena disharmonisasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat, keberpihakan panitia pemilihan terhadap salah satu pasangan calon kepala desa, penggunaan izasah palsu, adanya 2 (dua) SK Pjs Kepala Desa Mano yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Konflik sosial terjadi cukup lama dan resolusi konflik berupa mediasi sudah pernah dilakukan antara pihak kecamatan, Kapolres, Tokoh Agama dan Masyarakat, namun hasilnya belum menemukan titik terang dan kesepakatan untuk berdamai di antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga konflikpun muncul kembali.

Sementara itu, Retnowati (2018) melakukan penelitian tentang agama, konflik dan integrasi sosial refleksi kehidupan beragama di indonesia: belajar dari komunitas situbondo membangun integrasi pasca

konflik menemukan bahwa integrasi dalam masyarakat Situbondo dan upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh masyarakat dan umat beragama di Situbondo. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Situbondo menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo yang mengalami keretakan dapat dipulihkan kembali.

Selanjutnya, Ernas (2018) fokus penelitiannya tentang dari konflik ke integrasi sosial: pelajaran dari Ambon-Maluku menemukan bahwa meskipun orang-orang tersegregasi di wilayah Islam-Kristen, namun lambat laun integrasi sosial mulai terjadi tentu saja. Proses integrasi yang terjadi juga memberikan nilai-nilai baru yang memberi harapan untuk masa depan perdamaian. Menggunakan teori adaptasi integrasi sosial dari Paradigma klasik struktural-fungsional Parsonian, studi ini berhasil dirumuskan beberapa temuan penting. Pertama, integrasi sosial yang terjadi di Ambon dapat berjalan alami melalui interaksi ekonomi, konsensus tentang keseimbangan politik dan semangat keagamaan yang inklusif. Kedua, integrasi sosial baru telah menciptakan yang penting makna yang mengarah pada model harmoni aktif yang dicirikan oleh proses sosial interaksi yang lebih aktif antar umat beragama. Ketiga, penelitian ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun telah terjadi proses integrasi sosial yang positif, masyarakat masih perlu mewaspadaai tumbuhnya ideologi agama radikal dan juga penguatan politik identitas dalam politik lokal yang berbahaya bagi pembangunan perdamaian.



Dari kajian-kajian tentang konflik sosial tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang konflik sosial kepala desa masih banyak berfokus pada faktor penyebab konflik dan resolusi konflik, belum terlalu banyak mengkaji fungsi konflik pemilihan kepala desa terhadap sistem sosial terutama dalam konsep Luis A. Coser. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah melihat apakah ada fungsi konflik pemilihan kepala desa dalam sistem sosial Desa Tawa.

## 2.5 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir atas penelitian ini, digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

